

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sekolah Dasar (SD) Negeri Wirosari memiliki visi menjadikan SD Negeri Wirosari sekolah yang unggul, kreatif, inovatif, kompetitif dan religius. Sedangkan misinya antara lain adalah: mendorong siswa untuk mengenali potensi diri, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan kompetitif, menumbuhkan semangat keunggulan kepada seluruh warga sekolah, mendorong semangat belajar yang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa untuk menjadi sumber kearifan dalam bertindak.

SD Negeri Wirosari memiliki tujuan “mengantarkan seluruh siswa ke jenjang pendidikan selanjutnya, meningkatkan potensi para peserta didik, dan menjadikan warga sekolah yang disiplin dalam segala bidang.” (Visi dan Misi SD Negeri Wirosari. 2010). Prestasi-prestasi SD Negeri Wirosari di bidang akademik antara lain Juara 3 Lomba Mapel Matematika tingkat Kabupaten Grobogan tahun 2009 dan juara 2 Olimpiade IPA tingkat Kabupaten Grobogan tahun 2009. Prestasi-prestasi SD Negeri Wirosari dalam rangka sekolah sehat adalah Juara 1 Lomba sekolah sehat tingkat SD Kabupaten Grobogan tahun 2006 dan Juara 1 dalam Lomba Kebersihan lingkungan Sekolah tingkat SD Kabupaten Grobogan tahun 2008.

Deskripsi visi, misi, dan tujuan SD Negeri Wirosari seperti yang diuraikan di atas sesuai dengan semangat bahwa pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk menyiapkan manusia menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera, baik sebagai individu maupun secara bersama-sama sebagai warga masyarakat, bangsa maupun antar bangsa. Bagi pemeluk agama, masa depan mencakup kehidupan di dunia dan pandangan tentang kehidupan hari kemudian yang bahagia. Tujuan pendidikan nasional Indonesia menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa:

Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang beriman, dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (UU No. 20 2003 Pasal 3)

Tujuan pendidikan ini termasuk di dalamnya membentuk sumber daya manusia yang berkualitas yakni bangsa yang berperilaku taqwa kepada Allah, berilmu yang amaliah, beramal yang ilmiah. Dengan harapan bangsa ini mampu hadir dan siap dan berperan dalam persaingan global yang ketat.

Namun saat ini dunia pendidikan kita belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Fenomena itu ditandai dari rendahnya mutu lulusan, penyelesaian masalah pendidikan yang tidak tuntas, atau cenderung tambal sulam, bahkan lebih berorientasi proyek. Akibatnya, seringkali hasil pendidikan mengecewakan masyarakat. Mereka terus mempertanyakan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dalam dinamika kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kualitas lulusan pendidikan

kurang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pembangunan, baik industri, perbankan, telekomunikasi, maupun pasar tenaga kerja sektor lainnya yang cenderung menggugat eksistensi sekolah. Bahkan SDM yang disiapkan melalui pendidikan sebagai generasi penerus belum sepenuhnya memuaskan bila dilihat dari segi akhlak, moral, dan jati diri bangsa dalam kemajemukan budaya bangsa (Umaedi. 2004: 1).

Timbulnya pandangan seperti ini dipengaruhi oleh faktor kondisi realita yang dialami masing-masing kelompok masyarakat melalui jumlah lulusan yang belum banyak diserap pada lapangan pekerjaan yang tersedia. Masyarakat pada dasarnya telah menyadari pada kondisi era globalisasi sekarang ini bahwa mutu pendidikan sudah menjadi bagian yang prioritas untuk dapat diwujudkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Reformasi bidang politik di Indonesia pada penghujung abad ke 20 M telah membawa perubahan besar pada kebijakan pengembangan sektor pendidikan, yang secara umum bertumpu pada dua paradigma baru yang mandiri dan demokratis. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah telah meletakkan sektor pendidikan sebagai salah satu yang harus mandiri bersama sektor-sektor pembangunan yang berbasis kedaerahan lainnya seperti kehutanan, pertanian, koperasi dan pariwisata. Kemandirian di bidang pendidikan kemudian mendorong manajemen sekolah (kepala sekolah dan guru) memiliki tanggung jawab besar dalam peningkatan kualitas proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Baik dan buruknya kualitas hasil belajar siswa menjadi tanggung jawab guru dan kepala sekolah,

karena pemerintah daerah hanya memfasilitasi berbagai aktivitas pendidikan, baik sarana prasarana, ketenagaan, maupun berbagai program pembelajaran yang direncanakan sekolah.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, sebagai pengganti undang-undang nomor 2 tahun 1989 semakin menegaskan pelibatan masyarakat dalam pengembangan sektor pendidikan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 9 bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Pasal ini merupakan kelanjutan dari pernyataan pada pasal 4 ayat 1 bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan. Demokratisasi pendidikan merupakan implikasi dari dan sejalan dengan kebijakan mendorong pengelolaan sektor pendidikan pada daerah, yang penerapannya ditingkat sekolah, baik rencana pengembangan sarana, dan alat ketenagaan, kurikulum serta berbagai program pembinaan siswa, semua diserahkan pada sekolah untuk merancangnyanya serta mendiskusikannya dengan mitra horizontalnya dari komite sekolah (Syafarudin. 2002: 19).

Usaha lain yang tergolong universal seperti yang dikemukakan Rahman (2005: 2) adalah penerapan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa otonomi pendidikan berazaskan desentralisasi, dengan pendekatan manajemen berbasis sekolah (MBS). Pendekatan MBS dimaksudkan untuk menumbuhkan kemandirian dan kreativitas kepemimpinan kepala sekolah yang kuat dan efektif. Oleh karena

itu, amanat dalam Undang-undang tersebut harus menjadi dasar dan arah dalam pengembangan sekolah masa depan.

Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih disesuaikan dengan kondisi sekolah. Dalam kerangka inilah, MBS tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan yang ditawarkan. MBS merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan suatu penawaran bagi sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai bagi peserta didik karena MBS memberi peluang bagi kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah, berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran manajerial dan lain sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas, dan profesionalisme yang dimiliki dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Sekolah merupakan wahana penting dalam pembentukan sumber daya manusia. Kesuksesan untuk memperoleh mutu pendidikan yang baik tergantung kepada kepemimpinan yang kuat dari masing-masing kepala sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Crawford (2005: 18) yang

mengemukakan bahwa “pemimpin yang sukses adalah mereka-mereka yang organisasinya telah berhasil dalam mencapai tujuan.” Keberhasilan atau kesuksesan pelaksanaan kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola sekolah dipengaruhi oleh kemampuan untuk melakukan kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) terhadap semua operasional sekolah.

Keberhasilan sekolah dalam meraih mutu pendidikan banyak ditentukan oleh peran kepemimpinan kepala sekolah karena peran kepala sekolah sangat kuat mempengaruhi perilaku guru dan sumber-sumber daya pendukung lainnya. Sebagaimana dikemukakan Rahman (2005: 67) bahwa:

Kepemimpinan yang efektif membuat sekolah berubah secara dinamis karena adanya komunikasi lancar dalam kehidupan berorganisasi secara sistemik di mana di dalamnya mempunyai ciri dialogis, kerja sama dan tumbuhnya ilmu pengetahuan berpikir, mental model, penguasaan personal, berbagai *visi* sehingga anggota kelompok di sekolah terpenuhi kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, status dan kepuasan diri.

Pengelolaan sekolah di beberapa sekolah telah mengembangkan MBS sebagai penerapan kebijakan kemandirian sekolah. Namun sepertinya MBS belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh kepala sekolah karena persepsi pemahaman kemandirian sekolah pada tingkat guru ada perbedaan. Hal ini karena tingkat pemahaman yang berbeda dari masing-masing guru dan kepala sekolah. Karena itu diperlukan sosok kepala sekolah yang berkompeten, memiliki sifat kepemimpinan yang baik, dan terampil dalam mengelola sekolah.

SD Negeri Wirosari sebagai sebuah lembaga pendidikan dikelola dan dikembangkan di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang di bawah naungan pemerintah, maka kebijakan yang dilakukan tentu saja didasarkan pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik dalam bidang administrasi, proses pendidikan, proses pengelolaan dan lain sebagainya. Karena orientasi kurikulum sekarang mengacu pada peningkatan kualitas manajemen yang berbasis sekolah, maka penekanan pengembangan yang semula berorientasi pada kuantitas berubah menjadi kualitas, mandiri, dan desentralisasi. Namun realitasnya pihak SD Negeri Wirosari belum sepenuhnya mampu melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS) dengan optimal.

Hal ini karena rencana dan kebijakan sekolah mutlak di tangan kepala sekolah, sehingga guru hanya bertindak jika kepala sekolah memintanya. Dibutuhkan persepsi yang positif dari seluruh guru dan komponen sekolah tentang penerapan MBS serta penciptaan iklim yang demokratis di sekolah. Adanya persepsi positif dari seluruh komponen sekolah ini maka sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan secara efisien dan berkualitas sesuai dengan tujuan MBS.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui apakah kepala sekolah dan manajemen berbasis sekolah berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini penulis

mengadakan penelitian dengan judul: "PERSEPSI GURU TENTANG PERAN KEPALA SEKOLAH DAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH TERHADAP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI SD NEGERI WIROSARI KECAMATAN WIROSARI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2010/2011."

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dilakukan identifikasi masalah penelitian yang berkaitan dengan strategi peningkatan mutu pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Mutu pendidikan masih rendah
2. Sumber daya manusia bidang pendidikan yang belum merata secara kualitas
3. Peran kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan berbeda-beda pada tiap sekolah
4. Penerapan manajemen berbasis sekolah belum diterapkan secara menyeluruh
5. Sarana dan prasarana pendidikan yang kurang mendukung
6. Lingkungan pendidikan belum memberikan dukungan yang nyata

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka masalah yang dibatasi pada strategi peningkatan mutu pendidikan diantaranya:



1. Persepsi guru terhadap peran kepala sekolah dan implementasi manajemen berbasis sekolah
2. Peran kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Wirosari
3. Penerapan manajemen berbasis sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Wirosari
4. Mutu pendidikan di SD Negeri Wirosari perlu ditingkatkan

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:”

1. Apakah persepsi guru tentang peran kepala sekolah berpengaruh positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Wirosari ?
2. Apakah persepsi guru tentang implementasi manajemen berbasis sekolah berpengaruh positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Wirosari ?
3. Apakah persepsi guru tentang peran kepala sekolah dan implementasi manajemen berbasis sekolah berpengaruh positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Wirosari ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh positif persepsi guru tentang peran kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Wirosari

2. Untuk mengetahui pengaruh positif persepsi guru tentang implementasi manajemen berbasis sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Wirosari
3. Untuk mengetahui pengaruh positif persepsi guru tentang peran kepala sekolah dan implementasi manajemen berbasis sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Wirosari.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian pengaruh kepala sekolah dan penerapan MBS terhadap mutu pendidikan memberikan sejumlah manfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai korelasi antara penerapan MBS dengan mutu pendidikan serta dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil kaneh penelitian yang berbeda dan dengan sampel penelitian yang lebih banyak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Sekolah

- 1) Memberikan masukan bagi sekolah untuk mengetahui peningkatan mutu pendidikan melalui penerapan MBS.
- 2) Memberikan masukan bagi kepala sekolah dalam menerapkan gaya kepemimpinan di sekolah

- b. Bagi Guru

Sebagai informasi bagi para pendidik dan pelaku pendidikan dalam menerapkan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, khususnya aplikasi dalam pembelajaran di kelas

c. Bagi Dinas Pendidikan

Sebagai informasi untuk memberikan arahan dan dukungan bagi sekolah dalam penerapan MBS dan bahan evaluasi terhadap kinerja kepala sekolah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan disini penulis akan mencoba membagi dari beberapa Bab diantaranya:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Kegunaan Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, terdiri dari: Kepala sekolah, Manajemen berbasis sekolah, mutu pendidikan, kajian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari: Jenis Penelitian, Populasi, sampel, dan sampling, Data dan sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Uji Prasyarat Analisis Data, dan Teknik Analisa Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari: Gambaran Umum Obyek Penelitian, Deskripsi Analisis Data dan Penyajian Hasil Penelitian.

Bab V Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran-saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

